



LAPORAN KEUANGAN (Audited) TA. 2025

SATKER BRPBATPP

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

**BADAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

Kata Pengantar



Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan seluruh Satuan Kerja yang berada dibawah koordinasi Kementerian/Lembaga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan **Laporan Keuangan BRPBATPP TA 2025 (Audited)** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BRPBATPP. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 05 Mei 2026
Kepala BRPBATPP Bogor,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si
NIP. 197512162003122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	iv
I. Laporan Realisai Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	52



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN SEMPUR NO. 1 BOGOR, 16129
TELEPON (0251) 8313200, FAKSIMILE (0251) 8327890
LAMAM <https://kkp.go.id/brsdm/brpbatpp>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2025 (Audited)** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 5 Mei 2026
Kepala BRPBATPP Bogor,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. RR. Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi., M.Si
NIP. 197512162003122002

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan **Tahun Anggaran 2025 (Audited)** ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak senilai Rp176.484.476,00 atau mencapai 190,18% dari estimasi Pendapatan-LRA senilai Rp83.684.476,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp176.484.476,00 atau mencapai 190,18% dari alokasi anggaran senilai Rp92.800.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan senilai Rp119.696.011.945,00 yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp114.529.604,00; Aset Tetap (neto) senilai Rp119.818.569.729,00; dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp35.912.612,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp25.060.800,00 dan Rp119.943.951.145,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp107.429.371,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp100.837.929.037,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp100.730.499.666,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing senilai Rp44.187.457,00 dan senilai Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai (Rp100.686.312.209,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp121.442.409.766,00 dikurangi Defisit-LO senilai (Rp100.686.312.209,00) dikurangi dengan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas senilai Rp28.667.548,00, ditambah Transaksi Antar Entitas senilai Rp99.159.186.040,00 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp119.943.951.145,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Unaudited Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
✓ Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	92.800.000	176.484.476	190,18	153.182.570
✓ JUMLAH PENDAPATAN		92.800.000	176.484.476	190,18	153.182.570
BELANJA	B.2.				
✓ Belanja Pegawai	B.3	88.996.723.000	88.299.221.961	99,22	77.996.946.652
✓ Belanja Barang	B.4	10.999.315.000	10.987.946.055	99,90	13.640.259.438
✓ Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
✓ Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
✓ JUMLAH BELANJA		99.996.038.000	99.287.168.016	99,29	91.637.206.090

II. NERACA

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NERACA
PER 31 Desember 2025 DAN 2024
(Audited)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	TA 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C1	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C4	5.235.600	6.176.200
Bagian Lancar TP/TGR	C5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C7	(26.178)	(30.881)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C8	5.209.422	6.145.319
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C9	-	-
Persediaan	C10	111.565.300	131.842.500
Jumlah Aset Lancar		116.774.722	137.987.819
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C13	(26.178)	(30.881)
Jumlah Aset Lancar		116.774.722	137.987.819
ASET TETAP			
Tanah	C14	95.685.186.000	95.685.186.000
Peralatan dan Mesin	C15	34.060.138.304	34.785.253.831
Gedung dan Bangunan	C16	41.436.798.500	42.390.789.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C17	2.052.244.320	2.052.244.320
Aset Tetap Lainnya	C18	275.652.000	275.652.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C19	(53.691.449.395)	(53.915.460.553)
Jumlah Aset Tetap		119.818.569.729	121.273.665.098
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C20	126.467.500	126.467.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C21	-	165.188.000
Aset Lain-lain	C22	-	1.178.336.366
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C23	(90.554.888)	(1.156.266.527)
Jumlah Aset Lainnya		35.912.612	313.725.339
JUMLAH ASET		119.971.257.063	121.725.378.256
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C24	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C25	7.477.300	227.020.990
Utang Yang Belum Ditagihkan	C26	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C27	17.583.500	55.947.500
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25.060.800	282.968.490
JUMLAH KEWAJIBAN		25.060.800	282.968.490
EKUITAS			
Ekuitas	C29	119.946.196.263	121.442.409.766
JUMLAH EKUITAS		119.946.196.263	121.442.409.766
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		119.971.257.063	121.725.378.256

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Audited)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	107.429.371	131.678.900
JUMLAH PENDAPATAN		107.429.371	131.678.900
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	88.296.242.761	77.990.403.798
Beban Persediaan	D.3	268.742.000	318.490.630
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.848.654.607	10.600.516.535
Beban Pemeliharaan	D.5	817.342.906	2.050.973.171
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.111.052	687.178.587
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	52.001.500	124.876.400
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.537.819.315	1.696.887.946
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	26.178	(30.792)
JUMLAH BEBAN		100.837.940.319	93.469.296.275
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(100.730.510.948)	(93.337.617.375)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.11	(27.190.128)	(180.626.172)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.12	89.879.320	-
Beban Pelepasan Aset	D.13	117.069.448	180.626.172
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	-	-
Defisit Selisih Kurs	D.15	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	D.15	71.377.585	14.462.735
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	D.15	71.377.585	14.462.735
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
Jumlah SURPLUS/DEFISIT Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	44.187.457	(166.163.437)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(100.686.323.491)	(93.503.780.812)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(100.686.323.491)	(93.503.780.812)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Audited)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	121.442.409.766	123.198.994.269
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(100.686.312.209)	(93.503.780.812)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	30.923.948	125.126.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	28.636.667	125.126.400
LAIN-LAIN	E.3.6	2.287.281	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		99.159.186.040	91.622.069.909
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(1.496.213.503)	(1.756.584.503)
EKUITAS AKHIR	E.5	119.946.196.263	121.442.409.766

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum dan
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020 dan diundangkan pada 30 Desember 2020.

BRPBATPP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
- c. pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
- d. penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi dan Misi KKP tertuang dalam Rencana Strategis KKP, dimana Visi dan Misi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah **“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”**, yang mana di dalamnya mengandung tiga pilar yang

menjadi Misi KKP yaitu: **Kedaulatan (*sovereignty*), Keberlanjutan (*sustainability*), dan Kesejahteraan (*prosperity*).**

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dimana di dalamnya tertuang visi dan misi yang menunjang dan selaras dengan visi dan misi KKP. Adapun visi dari BRPBATPP yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”** dan misi BRPBATPP yaitu:

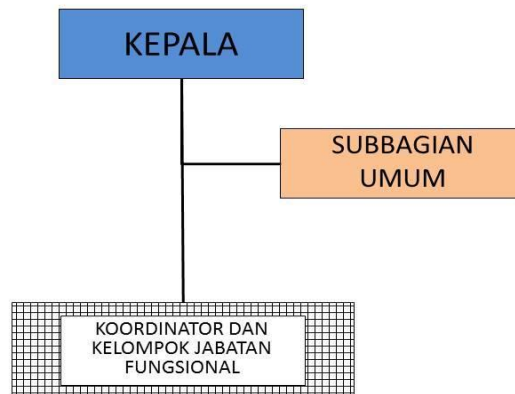
1. Meningkatkan riset yang inovatif dan implementatif melalui riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar melalui riset komprehensif untuk mencapai *center of excelent* dan *prime mover* budidaya air tawar;
3. Meningkatkan *Knowledge Base Management System* dalam mengaplikasikan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
4. Mewujudkan *Research Extension Lingkage* (REL) sebagai dasar kegiatan penyuluhan yang maju, kuat dan mandiri;
5. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan secara efektif dan efisien.

Keberadaan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sendiri juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BRSDM melalui kegiatan riset perikanan budidaya air tawar sebagai berikut:

1. Meningkatkan riset yang inovatif dan implementatif melalui riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetika populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
2. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
3. Meningkatkan *Knowledge Base Management System* dalam mengaplikasikan hasil riset perikanan budidaya air tawar;
4. Mewujudkan *Research Extension Lingkage* (REL) sebagai dasar kegiatan penyuluhan yang maju, kuat dan mandiri;
5. Mewujudkan tata kelola dan kerja sama dalam riset perikanan secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 74/PERMEN-KP/20020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan didukung oleh 757 pegawai yang terdiri dari:

No	Uraian	PNS	PPPK	Paruh Waktu	PJLP	Outsourcing	Jumlah
1	Kantor BRPBATPP Sempur Bogor	30	10	1	4	6	51
2	Instalasi Riset Plasma Nutfah Budidaya Air Tawar Cijeruk	5	9	1	2	6	23
3	Instalasi Riset Lingkungan Perikanan dan Toksikologi Cibalagung	7	3	1	2	6	19
4	Instalasi Riset Pengendalian Penyakit Ikan Depok	-	1	3	-	6	10
5	Penyuluh Perikanan (Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY)	292	353	9	-	-	654
Total		334	376	15	15	24	757

Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Non Fungsional

No	Uraian	Jumlah Orang
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Subbagian Umum	1
3	Tugas Belajar	0
4	Penyuluhan Perikanan	630
5	Pustakawan	1
6	Perencana	2
7	Analisis Kepegawaian	3
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
9	Pranata Keuangan	2
10	Pranata Humas	1
11	Arsiparis	2
12	JFU/Jabatan Fungsional Umum	26
13	Pranata Layanan Operasional	36
14	Pengelola Layanan Operasional	7
15	Operator Layanan Operasional	7
16	Pengadministrasian Perkantoran	1
17	Pengelola Umum Operasional	2
TOTAL		725

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2025 (Audited)** ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BRPBATPP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **Tahun Anggaran 2025 (Audited)** telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan senilai nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat senilai nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima rupiah);

- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moderen)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4

<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BRPBATPP melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 kali dari DIPA awal. Sumber pendapatan dan jenis belanja per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	92.800.000	92.800.000
Jumlah Pendapatan	92.800.000	92.800.000
Belanja		
Belanja Pegawai	74.289.965.000	88.996.723.000
Belanja Barang	11.817.606.000	10.999.315.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	86.107.571.000	99.996.038.000

Revisi DIPA sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebanyak 11 kali revisi (Terlampir), adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Revisi Pertama dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 dikarenakan adanya Revisi POK dan RPD.
2. Revisi kedua dilakukan pada tanggal 21 Februari 2025 dikarenakan adanya Revisi Blokir Efisiensi Anggaran senilai Rp6.239.824.000,00 sebagai Tindak Lanjut dari
 - Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam pelaksanaan APBN TA 2025; dan.
 - Nota Dinas Sekjen KKP Nomor 256/SJ/RC.420/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Usulan Efisiensi Anggaran Belanja KKP TA 2025.
3. Revisi ketiga dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 dikarenakan adanya Revisi POK dan RPD.
4. Revisi keempat dilakukan pada tanggal 9 April 2025 dikarenakan adanya Revisi Halaman III DIPA.
5. Revisi kelima dilakukan pada tanggal 16 April 2025 dikarenakan adanya Revisi POK dan RPD.
6. Revisi keenam dilakukan pada tanggal 7 Juli 2025 dikarenakan adanya Revisi RPD TW III.

7. Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 07 September 2025 dikarenakan adanya buka blokir dan pergeseran honor PPB 2 bulan ke akun operasional perkantoran.
8. Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025 dikarenakan adanya Revisi RPD TW IV.
9. Revisi kesembilan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2025 dikarenakan pemutakhiran POK ke Kanwil, pergeseran untuk Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PPPK.
10. Revisi kesepuluh dilakukan pada tanggal 19 November 2025 dikarenakan adanya usulan Revisi Belanja Gaji Pegawai BPPSDMKP sesuai Surat MKP Nomor B.1213/MenKP/XI/2025 tanggal 11 november 2025 dan Surat BPPSDMKP Nomor B.2281/BPPSDM/RC.420/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, hal Usulan Revisi Belanja Gaji Pegawai BPPSDMKP.
11. Revisi kesebelas dilakukan pada tanggal 12 Desember 2025 dikarenakan Revisi pemutakhiran POK (pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan Uang Makan Pegawai).

*Realisasi Pendapatan
Rp176.484.476,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan PNBPN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp176.484.476,00 atau mencapai 190,18 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp83.684.476,00. Pendapatan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Tarif yang dikenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA.2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.000.000	0	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.800.000	9.000.000	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	1.608.000	100,00
Penerimaan Royalti atas Kekayaan Intelektual	276.000	0	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	17.539.785	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	54.724.000	57.944.000	105,88
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	35.000.000	89.879.320	256,80
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	513.371	0,00
Jumlah	92.800.000	176.484.476	190,18

Realisasi Pendapatan PNBK Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan 15.21% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang peralatan dan mesin berupa 1 unit alat pembuat pellet senilai Rp17.750.000,- dan 1 unit stasiun wagon senilai Rp72.129.320,-.
2. Terdapat realisasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa sewa guest house.
3. Terdapat Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa aula instalasi Cijeruk selama 10 jam sebesar Rp1.608.000,-.
4. Terdapat realisasi Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan IPTEK berupa royalti vaksin Caprivax.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi		Nik / Turun (%)
	TA. 2025	TA. 2024	
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	598.500	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.000.000	5.400.000	66,67
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.608.000	804.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	1.600.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.539.785	19.903.670	-11,88
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	57.944.000	124.876.400	-53,60
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	513.371	0	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	89.879.320	0	100,00
Jumlah	176.484.476	153.182.570	15,21

*Realisasi Belanja
Negara
Rp99.287.168.016,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp99.287.168.016,00 atau 99,29% dari anggaran belanja senilai Rp99.996.038.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	88.996.723.000	88.299.221.961	99,22
Belanja Barang	10.999.315.000	10.987.946.055	99,90
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	99.996.038.000	99.287.168.016	99,29
Pengembalian	0	-	0,00
Jumlah	99.996.038.000	99.287.168.016	99,29

Realisasi Belanja Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai 8,35% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024. Pada belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,21% disebabkan karena adanya penambahan belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK. Pada belanja barang mengalami penurunan sebesar

19,44% adanya blokir AA dan adanya efisiensi anggaran terutama pada akun Belanja Perjalanan Dinas. Pada tahun anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Modal sehingga tidak ada realisasi Belanja Modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	88.299.221.961	77.996.946.652	13,21
Belanja Barang	10.987.946.055	13.640.259.438	-19,44
Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah	99.287.168.016	91.637.206.090	8,35

*Belanja Pegawai
Rp88.299.221.961,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing senilai Rp88.299.221.961,00 dan Rp77.996.946.652,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) mengalami kenaikan senilai 13,21% dari Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai PNS sebanyak 156 pegawai, pegawai PPPK sebanyak 290 pegawai dan pegawai PPPK Paruh Waktu sebanyak 15 pegawai, sehingga Pagu dan realisasi belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan mengalami kenaikan sampai dengan periode 31 Desember 2025.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan 31 Desember
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	19.393.790.600	19.507.514.400	-0,58
Belanja Pembulatan Gaji PNS	257.117	274.274	-6,26
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.519.666.000	1.506.117.450	0,90
Belanja Tunj. Anak PNS	473.582.066	467.936.742	1,21
Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.844.066.000	3.873.438.000	-0,76
Belanja Tunj. PPh PNS	257.543.696	256.185.862	0,53
Belanja Tunj. Beras PNS	1.064.284.320	1.061.966.880	0,22
Belanja Uang Makan PNS	2.992.849.000	3.119.042.000	-4,05
Belanja Tunjangan Umum PNS	60.595.000	60.465.000	0,22
Belanja Gaji Pokok PPPK	9.555.006.466	5.245.523.900	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200.328	111.500	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	647.392.500	342.126.470	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	193.706.796	105.960.564	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.484.850.000	852.360.000	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	578.334.050	317.489.280	100,00
Belanja Uang Makan PPPK	1.898.081.000	1.098.408.000	100,00
Belanja Tunjangan Umum PPPK	20.895.000	0	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	30.931.173.517	32.393.951.103	-4,52
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	13.372.922.929	7.766.958.838	100,00
Jumlah Belanja Kotor	88.314.396.385	78.001.030.263	100,00
Pengembalian Belanja Pegawai	(15.174.424)	(4.083.611)	271,59
Jumlah Belanja	88.299.221.961	77.996.946.652	13,21

Belanja Barang
Rp10.987.946.055,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp10.987.946.055,00 dan Rp13.640.259.438,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar 19,44% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024. Akan tetapi dibandingkan dengan pagu anggaran, realisasi belanja barang tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian belanja barang sejak DIPA Awal tahun anggaran 2025.

*Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	1.892.497.420	1.060.963.022	78,38
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	124.680.000	95.856.000	30,07
Belanja Barang Operasional Lainnya	40.787.500	139.465.427	-70,75
Belanja Bahan	76.807.110	254.904.802	-69,87
Belanja Honor Output Kegiatan	4.033.368.040	3.768.000.000	7,04
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1.342.569.560	-100,00
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	11.830.100	-100,00
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	24.738.000	-100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	250.976.800	302.531.300	-17,04
Belanja Langganan Listrik	509.400.389	825.289.902	-38,28
Belanja Langganan Telepon	5.748.746	2.288.656	151,18
Belanja Langganan Air	32.460.900	21.331.250	52,18
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	144.258.679	119.704.525	20,51
Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.500.000	20,00
Belanja Jasa Lainnya	3.041.201.513	2.936.481.996	3,57
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.016.953	1.321.207.045	-73,89
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.304.953	563.669.376	-43,00
Belanja Pemeliharaan Irigasi	150.526.000	163.501.750	-7,94
Belanja Perjalanan Biasa	17.111.052	683.078.587	-97,50
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4.100.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	10.987.946.055	13.643.011.298	-19,46
Pengembalian Belanja	-	(2.751.860)	100,00
Jumlah Belanja	10.987.946.055	13.640.259.438	-19,44

Belanja Modal Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Tahun Anggaran 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA. 2025	REALISASI TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Irigasi	0	0	100,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal Tanah
Rp.0,00*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan tanah untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0,00*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan peralatan dan mesin untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pembelian	0	0	0,00
Penyelesaian KDP	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.0,00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pembelian	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Penyelesaian KDP	0	0	0,00
Pengembangan Nilai	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Bangunan
Rp.0,00*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja modal pada jalan, irigasi, dan jaringan untuk mendukung tugas dan fungsi pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Irigasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	Naik (Turun) %
Pembelian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp.0,00*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2024 Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja modal lainnya Pada Tahun Anggaran 2025.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Pembelian	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan belanja bantuan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Unaudited Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Kelompok	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset lancar
Rp116.774.722,00

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja BRPBATPP per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp116.774.722,00 dan Rp137.987.819,00.

Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
BP Kas (Tunai dan Bank)	0	0
Uang Muka Kerja/Voucher	0	0
BP UP	0	0
BP TUP	0	0
Kuitansi UP	0	0
Uang di Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai masing-masing senilai Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	0	0
Uang di Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp5.235.600,00

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp5.235.600,00 dan Rp6.176.200,00. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya, Piutang Bukan Pajak senilai Rp5.235.600,00 merupakan pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2025 senilai Rp2.205.900,00; pengembalian uang makan PPPK bulan Desember 2025 senilai Rp773.300,00 dan pengembalian pembayaran kelebihan tunjangan fungsional PNS senilai Rp2.256.400,00 (an. Ahmad Taufik Rp1.460.900,00 dan an. Erfina Savitri Rp795.500,00) Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB *Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang Bukan Pajak	5.235.600	6.176.200
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	5.235.600	6.176.200

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar TPA
Rp0,00*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Bukan Pajak
(Rp26.178,00)*

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai (Rp26.178,00) dan Rp(30.881),00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak adalah merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Bukan Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	0	50%	0
Macet	0	100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0.50%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan		50%	0
Macet		100%	0
Jumlah	0		0

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp17.583.500,00*

C.1.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp17.583.500,00 dan Rp12.862.375,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan yang harus diterima senilai Rp17.583.500,00 berasal dari pengembalian tunjangan dan uang makan pegawai. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.583.500	12.862,735
NIHIL	0	0
Jumlah	17.583.500	-

*Persediaan
Rp111.565.300,00*

C.1.19 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp111.565.300,00 dan Rp131.842.500,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Rincian Persediaan Tahun Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	12.483.800	15.443.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	495.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	4.668.500
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0
Persediaan Lainnya	99.081.500	111.236.000
Jumlah	111.565.300	131.842.500

- Jenis persediaan berupa barang konsumsi sejumlah Rp12.483.800,00 terdiri dari ATK, Bahan Komputer dan bahan baku pakan ikan;
- Jenis persediaan lainnya sejumlah Rp99.081.500,00 terdiri dari induk ikan, calon induk ikan, dan benih ikan.

Rincian mutasi tambah persediaan per 31 Desember 2025 yaitu:

a. M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode pelaporan tahun 2025 senilai Rp.250.976.800,00. Seluruh nya adalah barang konsumsi.

b. M06 – Perolehan Lainnya

Perolehan lainnya selama periode Tahun 2025 senilai Rp.60.014.000,00. Transaksi Perolehan Lainnya ini adalah transaksi yang terjadi karena adanya penjualan ikan koleksi dan benih dari ikan kegiatan SFV yang menghasilkan PNB

Rincian mutasi kurang persediaan per 31 Desember 2025 yaitu:

a. K01 – Habis Pakai

Transaksi Habis Pakai senilai Rp.317.043.500,00 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran untuk menunjang tugas fungsi Balai.

b. K06 – Keluar Lainnya

Transaksi Keluar Lainnya selama periode 31 Desember 2025 senilai Rp.10.029.500,00.

Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 31 Desember 2025 (periode pelaporan). Hasil Opname Fisik senilai Rp.(4.195.000,00).

Aset Tetap

*Rp119.818.569.729,
00*

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp119.818.569.729,00 dan Rp121.273.665.098,00.

Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan asset tetap lainnya.

Tanah

Rp95.685.186.000,00

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp95.685.186.000,00 dan Rp95.685.186.000,00. Rincian saldo berupa Tanah per 31 Desember 2025 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	95.685.186.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2024	95.685.186.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahun Anggaran 2025

No.	KIB	Luas (m2)	Nilai (Rp.)	Alamat	Kondisi	No. Sertifikat
1	1	155	317.130.000	Pasir Jaya	Baik	NIB. 10.09.05.12.00444
2	1	4.215	8.843.070.000	Jl. Sempur No. 1, Bogor	Baik	NIB. 10.09.03.01.00065
3	2	11.975	43.328.331.000	Jl. Raya Banteng Suroso No. 6	Baik	NIB. 10.09.05.12.00090
4	1	8.814	10.620.870.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00219
5	1	9.950	12.064.375.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00160
6	2	5.280	6.283.200.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00233
7	3	2.260	2.683.750.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00010
8	4	937	1.105.660.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00121
9	5	4.570	5.484.000.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00133
10	6	4.129	4.954.800.000	Cijeruk	Baik	NIB. 10.10.08.07.00132
Total		52.285	95.685.186.000			

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 5.06 m2 yang berlokasi di Jl. Sempur No.1 Bogor dengan nilai sebesar Rp. 57.546.000,00 dengan Nomor 01/BRSDM-BRPBATPP/PKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan masa sewa 3 tahun periode sewa 22 Desember 2023 – 21 Desember 2026.

Penjelasan rinci atas permasalahan tanah diatas ialah:
Tidak bersengketa.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp34.060.138.304,00 dan Rp34.785.253.831,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	34.785.253.831
Mutasi tambah:	
Pembelian(101)	0
Transfer masuk (102)	641.991.275
Perolehan Lainnya (112)	0
Reklasifikasi Masuk (107)	115.390.000
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar (304)	(115.390.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	(1.367.106.802)
Saldo per 31 Desember 2025	34.060.138.304
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(33.225.039.261)
Nilai Buku per 30 September 2025	835.099.043

Rincian mutasi tambah dan kurang transaksi Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk (102) dari Balai Riset Perikanan Laut berupa Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi) 3 unit, Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi) 3 unit, Automatic Pipet Set 1 unit, Alat Pengambil Sample Air 1 unit, Highg Speed Centrifuge 1 unit dan Rak Microtubes 4 unit dengan nilai Rp.547.836.925,00 dengan nomor BAST BA.891/BRPL/PL.750/V/2025 tanggal 20 Mei 2025;
2. Transfer Masuk (102) dari Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan berupa 45 unit dengan nilai Rp.105.598.350.000,00 dengan nomor BAST B.3535/BPPSDM.2/PL.750/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025;
3. Reklasifikasi Masuk (107) berupa PH Meter 1 unit, Conductivity Meter 1 unit, Laboratory High Speed Centrifuge 1 unit, dan Unit Alat Laboratorium Lainnya 1 unit dengan nilai Rp.115.390.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi BMN Nomor B.1329/BRPBATPP/PL.760/IX/2025 tanggal 16 September 2025.

Rincian mutasi kurang transaksi Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Keluar (304) berupa Test Nitrit dan Besi 1 unit, PH Meter Digital Portable 1 unit, Conductivity Meter Portable 1 unit, dan High Speed Centrifuge 1 unit dengan nilai Rp.115.390.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi BMN Nomor B.1329/BRPBATPP/PL.760/IX/2025 tanggal 16 September 2025;
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) sebanyak 219 unit dengan nilai Rp.1.367.106.802,00 dengan BA. Inventarisasi B.1359/BRPBATPP/PL.750/IX/2025 tanggal 25 September 2025.

*Gedung dan
Bangunan*

Rp41.436.798.500,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp41.436.798.500,00 dan Rp42.390.789.500,00 Sedikit mengalami penurunan hal ini disebabkan terdapat penghentian aset dari penggunaan / usulan penghapusan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	42.390.789.500
Mutasi tambah:	
Transfer masuk (102)	0
Reklasifikasi masuk (107)	188.448.000
Koreksi Nilai (205)	0
Pengembangan melalui KDP	0
Mutasi kurang:	0
Transfer keluar (302)	-
Reklasifikasi Keluar (304)	(188.448.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)	(953.991.000)
Saldo per 31 Desember 2025	41.436.798.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(19.600.070.066)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	21.836.728.434

Rincian mutasi tambah dan kurang transaksi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Masuk (107) berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen 2 unit dengan nilai Rp.188.448.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi BMN Nomor B.1415/BRPBATPP/PL.760/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025;

Rincian mutasi kurang transaksi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Keluar (304) berupa Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen Permanen 2 unit dengan nilai Rp.188.448.000,00 berdasarkan Surat Keterangan Koreksi BMN Nomor B.1415/BRPBATPP/PL.760/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025;
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen 14 unit dengan nilai Rp.953.991.000,00 dengan BA. Inventarisasi B.1009/BRPBATPP/PL.750/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025;

*Jalan,Jaringan dan
Irigasi
Rp2.052.244.320,00*

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp2.052.244.320,00 dan Rp2.052.244.320,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, rinciannya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.052.244.320
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk (102)	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2025	2.052.244.320
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(866.340.068)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.185.904.252

*Aset Tetap Lainnya
Rp275.652.000,00*

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp275.652.000,00 dan Rp275.652.000,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	275.652.000
Mutasi tambah:	
- Transfer masuk (102)	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	275.652.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	275.652.000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp53.691.449.395,00

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp53.691.449.395,00 dan Rp53.915.460.553,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	95.685.186.000	0	95.685.186.000
2	Peralatan dan Mesin	34.060.138.304	33.225.039.261	835.099.043
3	Gedung dan Bangunan	41.436.798.500	19.600.070.066	21.836.728.434
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.052.244.320	866.340.068	1.185.904.252
5	Aset Tetap Lainnya	275.652.000	0	275.652.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		173.510.019.124	53.691.449.395	119.818.569.729

Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

C.3 Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Akuntansi Bogor merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	NIHIL	0	0
2	NIHIL	0	0
3	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
(Rp26.178,00)

C.3.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai (Rp26.178,00) dan (Rp30.881,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya
Rp35.912.612,00

C.4 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing senilai Rp35.912.612,00 dan Rp313.725.339,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Dana yang Dibatasi Penggunaanya.

Aset Tak Berwujud
Rp126.467.500,00

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing senilai Rp126.467.500,00 dan Rp126.467.500,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berupa Paten (Vaksin dan Probiotik) hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	126.467.500
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk (102)	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar (302)	0
Penghentian Aset dari Penggunaan (401)	0
Saldo per 31 Desember 2025	126.467.500
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2025	(90.554.888)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	35.912.612

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2025

Uraian	Nilai Perolehan
Vaksin Aeromonas hydrophila	93.057.500
Vaksin Koktail Aeromonas hydrophila - Streptococcus agalactiae	33.410.000
Jumlah	126.467.500

Aset Lain-Lain

Rp0,00

C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaanya

Saldo Aset lainnya berupa Dana yang Dibatasi Penggunaanya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0,00 dan Rp165.188.000,00. Aset lainnya berupa Dana yang Dibatasi Penggunaanya pada satker BRP BAT merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga.

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
- Dana yang Dibatasi Penggunaanya	0
Mutasi kurang:	
- koreksi	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp90.554.888,00

C.4.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp90.554.888,00 dan Rp1.156.266.527,00. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya satker BRP BATPP berasal dari Akumulasi Amortisasi Paten. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Akumulasi Amortisasi Paten		(90.554.888)	
Jumlah	0	(90.554.888)	0
Aset Lain-lain		0	
Jumlah	0	(90.554.888)	0

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp25.060.800,00

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp25.060.800,00 dan Rp282.968.490,00.

Kewajiban jangka pendek berupa Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp7.477.300,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17.583.500,00.

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai dan Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau Rp0,00 dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp7.477.300,00

C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp7.477.300,00 dan Rp227.020.990,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga berasal dari tagihan internet bulan Desember 2025 senilai Rp6.670.000,00 dan tagihan air bulan Desember 2025 senilai Rp807.300,00.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp17.583.500,00

C.5.3 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah senilai Rp17.583.500,00 dan Rp55.947.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Dalam hal ini, pendapat tersebut berasal dari sewa tanah, gedung dan bangunan berupa ATM.

Dari jumlah/nilai tanah di atas, terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga sejumlah 5.06 m2 dengan nilai sebesar Rp. 57.546.000,00 dengan Nomor 01/BRSDM-BRPBATPP/PKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan masa sewa 3 tahun periode sewa 22 Desember 2023 – 21 Desember 2026. Untuk pengakuan pendapatan dalam bulan Desember 2024 sebesar (Rp1.598.500,00) sehingga Pendapatan Sewa yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar **Rp17.583.500** (Rp57.546.000,00-Rp39.962.500,00)

Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang Pendapatan Diterima di Muka per 31
Desember 2025*

Uraian	Jumlah
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (ATM)	17.583.500
Total	17.583.500

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,00*

C.5.4 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban Yang Masih Harus Dibayar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Uraian	TH 2025	TH 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Ekuitas

*Rp119.946.196.263,0
0*

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp119.946.196.263,00 dan Rp121.442.409.766,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp176.484.476,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp176.484.476,00 dan Rp153.182.570,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

Uraian	Realisasi		Nik / Turun (%)
	TA. 2025	TA. 2024	
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	598.500	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	9.000.000	5.400.000	66,67
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.608.000	804.000	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	1.600.000	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	17.539.785	19.903.670	-11,88
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	57.944.000	124.876.400	-53,60
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan dan Pengembangan Iptek Lainnya	513.371	0	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	89.879.320	0	100,00
Jumlah	176.484.476	153.182.570	15,21

Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan ikan nila, ikan torskoro dan ikan mas. Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan berasal dari sewa aula instalasi Cijeruk selama 10 jam. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana berasal dari sewa Gouse House. Pendapatan royalti atas kekayaan intelektual berasal dari royalti kerjasama lisensi vaksin capprivac hydrogalaksi. Sedangkan pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang peralatan dan mesin berupa 1 unit alat pembuat pellet senilai Rp17.750.000,- dan 1 unit stasiun wagon senilai Rp72.129.320,-.

Beban Pegawai
Rp88.296.242.761,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp88.296.242.761,00 dan Rp77.990.403.798,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	19.507.514.400	10.143.856.500	92,31
Beban Pembulatan Gaji PNS	264.279	147.119	79,64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.505.234.915	763.175.610	97,23
Beban Tunj. Anak PNS	467.936.742	226.826.228	106,30
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	11.340.000	122,22
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.872.843.000	2.075.590.000	86,59
Beban Tunj. PPh PNS	256.185.862	67.163.574	281,44
Beban Tunj. Beras PNS	1.061.966.880	575.594.160	84,50
Beban Uang Makan PNS	3.114.151.115	1.659.162.000	87,69
Beban Tunj. Umum PNS	60.280.000	63.334.866	-4,82
Beban Gaji Pokok PPPK	5.243.455.100	730.676.000	617,62
Beban Pembulatan Gaji PPPK	111.500	19.137	482,64
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	342.023.030	37.925.900	801,82
Beban Tunj. Anak PPPK	105.919.188	14.047.620	654,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	851.280.000	126.960.000	570,51
Beban Tunj. Beras PPPK	317.489.280	44.827.980	608,24
Beban Uang Makan PPPK	1.097.638.566	158.064.000	594,43
Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kine	32.393.951.103	14.968.378.956	116,42
Beban Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kine	7.766.958.838	1.043.517.722	644,31
Jumlah	77.990.403.798	32.710.607.372	138,43

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp268.742.000,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp268.742.000,00. dan Rp318.490.630,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	281.247.900	174.605.450	61,08
Beban Persediaan Bahan Baku	28.552.730	25.461.552	100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	8.690.000	63.206.500	0,00
Beban Persediaan Dijual/Diserahkan	124.876.400		
Jumlah	443.367.030	263.273.502	68,41

*Beban Barang dan
Jasa
Rp9.848.654.607,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp9.848.654.607,00 dan Rp10.600.516.535,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penurunan kebutuhan barang operasional lainnya, penurunan penggunaan listrik karena adanya efisiensi penggunaan ruang rapat serta efisiensi penggunaan belanja bahan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.892.497.420	1.060.963.022	78,4
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.680.000	95.856.000	30,1
Beban Barang Operasional Lainnya	40.787.500	139.465.427	-70,8
Beban Bahan	76.807.110	254.904.802	-69,9
Beban Honor Output Kegiatan	4.033.368.040	3.765.248.140	7,1
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1.342.569.560	-100,0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	11.830.100	100,0
Beban Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel	0	24.738.000	100,0
Beban Langganan Listrik	448.186.199	825.385.857	-45,7
Beban Langganan Telepon	5.748.746	2.288.656	151,2
Beban Langganan Air	32.649.400	19.580.450	66,7
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	150.928.679	119.704.525	26,1
Beban Jasa Profesi	1.800.000	1.500.000	20,0
Beban Jasa Lainnya	3.041.201.513	2.936.481.996	3,6
Jumlah	9.848.654.607	10.600.516.535	-7,09

Beban Pemeliharaan
Rp816.847.906,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp816.847.906,00 dan Rp2.050.973.171,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan Beban Pemeliharaan disebabkan karena pemeliharaan di beberapa tempat pada tahun 2025 ini tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun 2024. Sedangkan di tahun 2024 ada pemeliharaan talud karena longsor akibat hujan deras. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345.016.953	1.321.207.045	(73,89)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321.304.953	563.669.376	(43,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Irigasi	150.526.000	163.501.750	
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	0	2.595.000	0,00
Jumlah	816.847.906	2.050.973.171	-60,17

Beban Perjalanan
Dinas
Rp683.078.587,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp17.111.052,00 dan Rp687.178.587,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan 2024.

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	17.111.052	683.078.587	-97,50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4.100.000	0,00
Beban Perjalanan Paket Meeting dalam Kota	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Jumlah	17.111.052	687.178.587	-97,51

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp52.001.500,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp52.001.500,00 dan Rp124.876.400,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas berupa penjualan hasil perikanan yang bersumber dari persediaan ikan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual Atau Siserahkan Kepada Masyarakat	52.001.500	124.876.400	100,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	52.001.500	124.876.400	100,00

Beban Bantuan
Sosial Rp0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.537.819.315,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp1.537.819.315,00 dan Rp1.696.887.946,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	617.006.830	744.832.204	(17,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	855.283.093	855.283.094	(0,00)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13.639.263	13.639.263	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	20.060.143	20.060.142	0,00
Beban Penyusutan Paten	0	0	100,00
Beban Penyusutan Jaringan	26.245.207	26.660.142	(1,56)
Jumlah Penyusutan	1.532.234.536	1.660.474.845	(7,72)
Beban Amortisasi Paten	5.584.779	29.930.256	(81,34)
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	5.584.779	29.930.256	(81,34)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.537.819.315	1.690.405.101	(9,03)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
(Rp26.178).00*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai (Rp26.178),00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-14.896	0	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	-14.896	0	0,00

*Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp44.187.457,00*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 Rp44.187.457,00 dan 2024 (Rp166.163.473,00) adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2025 dan 2024*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	-27.190.128	-180.626.172	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset	89.879.320	0	100,00
Beban Pelepasan Aset	117.069.448	180.626.172	(35,19)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71.377.585	14.462.735	393,53
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	44.187.457	-166.163.437	-126,59

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp121.442.409.766,0
0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp121.442.409.766,00 dan Rp123.198.994.269,00.

Defisit LO

(Rp100.686.323.491,00)

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai (Rp100.686.323.491,00) dan (Rp93.503.780.812,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai
Aset

Rp0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp28.636.667,00

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp28.636.667,00 dan Rp125.126.400,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	28.636.667
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	28.636.667

Koreksi Lain-Lain Rp0,00

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp16.355,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Lain-Lain	-
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp99.159.186.040,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp99.159.186.040,00 dan Rp91.622.069.909,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	153.398.295
Ditagihkan ke Entitas Lain	91.637.206.090
Transfer Masuk	291.444.684
Transfer Keluar	153.398.295
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	92.235.447.364

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL senilai Rp(91.637.206.090,00) sedangkan DDEL senilai Rp153.398.295.00.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp(291.444.684,00) dan 153.398.295,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Lain	Nilai
1	Transfer Masuk		(291.444.684)
2	Transfer Keluar		153.398.295

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. dari total Rp0,00 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL	NIHIL	Rp -
2	NIHIL	NIHIL	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir
Rp119.946.196.263,0
0

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp119.946.196.263,00 dan Rp121.442.409.766,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor: KEP.25/MEN-KP/KU.611/2022 tanggal 11 Maret 2023, Tentang perubahan ketiga puluh empat atas keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja kantor daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Plt. Kepala BRPBATPP
Dr. Raden Roro Sri Pudji Dewi. S.Pi, M.Si

F.2. Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 1/BRSDM-BRPBATPP/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen dn Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satker BRPBATPP Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Arif Budiman, S.Pi
- Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Umar As'ari, M.M

F.3. Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor 2/BRSDM-BRPBATPP/KU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Satker BRPBATPP Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- Bendahara Pengeluaran
Sumarni, A.Md, BNT
- Bendahara Penerimaan
Reny Rakhmawati, A.Md

F.4. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah sistem pengendalian khusus yang dirancang untuk memastikan laporan keuangan pemerintah andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Diterapkan berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.09/2019, PIPK bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah kesalahan dalam penyajian laporan keuangan instansi.

Berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.3166/BPPSDM.1/KU.130/IV/2025 tanggal 9 April 2025 tentang penetapan akun signifikan PIPK TA. 2025, satker BRPBATPP mengusulkan dua akun signifikan yaitu akun 111611 (Kas di Bendahara Pengeluaran) dengan pertimbangan Risiko sisa saldo di akhir periode pelaporan yang seharusnya bernilai 0 (nol) serta akun 132111 (Peralatan dan Mesin Risiko Peralatan dan Mesin) dengan pertimbangan Risiko Peralatan dan Mesin yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (hilang/rusak berat/rusak ringan).

F.5. Pengungkapan Capaian Rincian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan terdapat fungsi (1) Kelompok pelaku Utama/Usaha yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan, (2) Layanan BMN, (3) Layanan Hubungan Masyarakat, (4) Layanan Umum, (5) Layanan Perkantoran, (6) Layanan Manajemen Keuangan dengan rincian terlampir.

F.6. Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Namun Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan tetap mendukung program Prioritas Nasional melalui tenaga Penyuluhan Perikanan sebagai supporting program Prioritas Nasional Ekonomi Biru.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	107,429,371	131,678,900	(24,249,529)	(18.416)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	107,429,371	131,678,900	(24,249,529)	(18.416)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	107,429,371	131,678,900	(24,249,529)	(18.416)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	88,296,242,761	77,990,403,798	10,305,838,963	13.214
Beban Persediaan	268,742,000	318,490,630	(49,748,630)	(15.62)
Beban Barang dan Jasa	9,848,654,607	10,600,516,535	(751,861,928)	(7.093)
Beban Pemeliharaan	817,342,906	2,050,973,171	(1,233,630,265)	(60.149)
Beban Perjalanan Dinas	17,111,052	687,178,587	(670,067,535)	(97.51)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	52,001,500	124,876,400	(72,874,900)	(58.358)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,537,819,315	1,696,887,946	(159,068,631)	(9.374)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	26,178	(30,792)	56,970	(185.016)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	100,837,940,319	93,469,296,275	7,368,644,044	7.883
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(100,730,510,948)	(93,337,617,375)	(7,392,893,573)	7.921
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(27,190,128)	(180,626,172)	153,436,044	(84.947)
Pendapatan Pelepasan Aset	89,879,320	0	89,879,320	
Beban Pelepasan Aset	117,069,448	180,626,172	(63,556,724)	(35.187)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,377,585	14,462,735	56,914,850	393.528
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	71,377,585	14,462,735	56,914,850	393.528
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	44,187,457	(166,163,437)	210,350,894	(126.593)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(100,686,323,491)	(93,503,780,812)	(7,182,542,679)	7.682
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(100,686,323,491)	(93,503,780,812)	(7,182,542,679)	7.682

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	121,442,409,766	123,198,994,269	(1,756,584,503)	(1.43)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(100,686,323,491)	(93,503,780,812)	(7,182,542,679)	7.68
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	30,923,948	125,126,400	(94,202,452)	(75.29)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	28,636,667	125,126,400	(96,489,733)	(77.11)
LAIN-LAIN	2,287,281	0	2,287,281	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	99,159,186,040	91,622,069,909	7,537,116,131	8.23
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,496,213,503)	(1,756,584,503)	260,371,000	(14.82)
EKUITAS AKHIR	119,946,196,263	121,442,409,766	(1,496,213,503)	(1.23)

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN 403829

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	92,800,000	176,484,476	83,684,476	190	92,050,000	153,182,570	(61,132,570)	166
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	92,800,000	176,484,476	83,684,476	190	92,050,000	153,182,570	(61,132,570)	166
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	92,800,000	176,484,476	83,684,476	190	92,050,000	153,182,570	(61,132,570)	166
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	99,996,038,000	99,287,168,016	(708,869,984)	99	96,023,914,000	91,637,206,090	4,386,707,910	95
1. Belanja Pegawai	88,996,723,000	88,299,221,961	(697,501,039)	99	78,014,965,000	77,996,946,652	18,018,348	100
2. Belanja Barang	10,999,315,000	10,987,946,055	(11,368,945)	100	18,008,949,000	13,640,259,438	4,368,689,562	76
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN 403829

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 9:06 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	99,996,038,000	99,287,168,016	(708,869,984)	99	96,023,914,000	91,637,206,090	4,386,707,910	95
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi
NIP 197512162003122002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	5,235,600	6,176,200	(940,600)	(15.23)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(26,178)	(30,881)	4,703	(15.23)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	5,209,422	6,145,319	(935,897)	(15.23)
Persediaan	111,565,300	131,842,500	(20,277,200)	(15.38)
JUMLAH ASET LANCAR	116,774,722	137,987,819	(21,213,097)	(15.37)
ASET TETAP				
Tanah	95,685,186,000	95,685,186,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	34,060,138,304	34,785,253,831	(725,115,527)	(2.08)
Gedung dan Bangunan	41,436,798,500	42,390,789,500	(953,991,000)	(2.25)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,052,244,320	2,052,244,320	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	275,652,000	275,652,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(53,691,449,395)	(53,915,460,553)	224,011,158	(0.42)
JUMLAH ASET TETAP	119,818,569,729	121,273,665,098	(1,455,095,369)	(1.20)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	126,467,500	126,467,500	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	165,188,000	(165,188,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	0	1,178,336,366	(1,178,336,366)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(90,554,888)	(1,156,266,527)	1,065,711,639	(92.17)
JUMLAH ASET LAINNYA	35,912,612	313,725,339	(277,812,727)	(88.55)
JUMLAH ASET	119,971,257,063	121,725,378,256	(1,754,121,193)	(1.44)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	7,477,300	227,020,990	(219,543,690)	(96.71)
Pendapatan Diterima Dimuka	17,583,500	55,947,500	(38,364,000)	(68.57)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,060,800	282,968,490	(257,907,690)	(91.14)
JUMLAH KEWAJIBAN	25,060,800	282,968,490	(257,907,690)	(91.14)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	119,946,196,263	121,442,409,766	(1,496,213,503)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	119,946,196,263	121,442,409,766	(1,496,213,503)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	119,946,196,263	121,442,409,766	(1,496,213,503)	(1.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	119,971,257,063	121,725,378,256	(1,754,121,193)	(1.44)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,235,600	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	26,178
0.0	117111	Barang Konsumsi	12,483,800	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	99,081,500	0
0.0	131111	Tanah	95,685,186,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	34,060,138,304	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	41,436,798,500	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	381,691,000	0
0.0	134112	Irigasi	662,585,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,007,968,320	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	275,652,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	33,225,039,261
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,600,070,066
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	288,809,122
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	211,396,235
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	366,134,711
0.0	162141	Paten	126,467,500	0
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	90,554,888
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	7,477,300
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	17,583,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	99,287,168,016
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	176,484,476	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	48,502,500
0.0	391111	Ekuitas	0	121,442,409,766
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	28,636,667
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	2,287,281
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	57,944,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	89,879,320
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	39,972,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,000,000
3.0	425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	513,371
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,363,585
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	60,014,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,393,790,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	254,686	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,519,666,000	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	473,582,066	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,842,707,600	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	257,543,696	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,064,284,320	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,990,643,100	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	59,849,900	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	9,550,612,466	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	190,559	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	645,470,340	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	192,937,932	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,484,850,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	578,334,050	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,897,307,700	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	20,895,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	30,925,199,817	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13,372,922,929	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,892,497,420	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,787,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	76,807,110	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,033,368,040	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	448,186,199	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,748,746	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	32,649,400	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	150,928,679	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,041,201,513	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345,016,953	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321,304,953	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	150,526,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	17,111,052	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	617,006,830	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	855,283,093	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	13,639,263	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	20,060,143	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	26,245,207	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	5,584,779	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	253,936,000	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:07 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	495,000	0
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	52,001,500	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	4,668,500	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	10,137,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	26,178	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	117,069,448	0
JUMLAH			274,884,781,767	274,884,781,767

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

NIP 197512162003122002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	99,287,168,016
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	176,484,476	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	57,944,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	89,879,320
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,608,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	9,000,000
3.0	425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	513,371
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,539,785
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,393,790,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	257,117	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,519,666,000	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	473,582,066	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,844,066,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	257,543,696	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,064,284,320	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,992,849,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	60,595,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	9,555,006,466	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200,328	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	647,392,500	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	193,706,796	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,484,850,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	578,334,050	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,898,081,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	20,895,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	30,931,173,517	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13,372,922,929	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,892,497,420	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	124,680,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	40,787,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	76,807,110	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,033,368,040	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	250,976,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	509,400,389	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,748,746	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	32,460,900	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (403829) BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 9:08 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	144,258,679	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,041,201,513	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	345,016,953	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	321,304,953	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	150,526,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,111,052	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,431
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,358,400
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	745,100
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	4,394,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	9,769
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1,922,160
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	768,864
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	5,973,700
JUMLAH			99,478,826,916	99,478,826,916

Keterangan :

FINAL

BOGOR, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dr. RR Sri Pudji Sinarni Dewi

197512162003122002

LAPORAN KINERJA 2025

Periode Desember 2025

KEMENTERIAN : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : 03212 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SATUAN KERJA 403829 BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Tanggal 05-05-2026
Hal 1 dari 1

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4,033,400,000	4,033,368,040	100 %	—	—	—	—
7020	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	4,033,400,000	4,033,368,040	100 %	—	—	—	—
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4,033,400,000	4,033,368,040	100 %	—	—	—	—
646	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	4,033,400,000	4,033,368,040	100 %	5,665	5,665	100 %	Kelompok Masyarakat
WA	Program Dukungan Manajemen	95,962,638,000	95,268,974,400	99.3 %	—	—	—	—
2378	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	95,962,638,000	95,268,974,400	100 %	—	—	—	—
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95,962,038,000	95,268,374,400	99.3 %	—	—	—	—
956	Layanan BMN	600,000	600,000	100 %	1	1	100 %	Layanan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	450,000	450,000	100 %	1	1	100 %	Layanan
962	Layanan Umum	17,480,000	17,261,052	98.8 %	1	1	100 %	Layanan
994	Layanan Perkantoran	95,943,508,000	95,250,063,348	99.3 %	1	1	100 %	Layanan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	600,000	600,000	100 %	—	—	—	—
955	Layanan Manajemen Keuangan	600,000	600,000	100 %	1	1	100 %	Dokumen